

SUBSIDI - APBD

2025

PERBUP TABALONG NO. 4, BD 2025/NO. 4, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perpres 12 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang pedoman dalam pemberian Belanja Subsidi yang bersumber dari APBD dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pemberian Belanja Subsidi dapat berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. batasan dan kriteria; b. penganggaran dan tata cara pemberian Belanja Subsidi; c. pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan d. monitoring dan evaluasi.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2025.